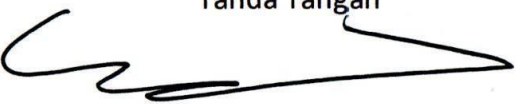
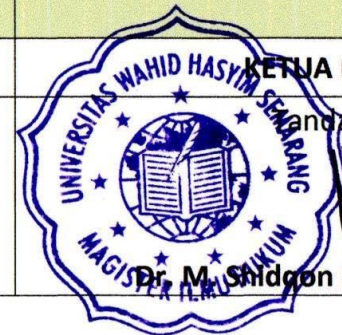


RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER

	Nama Perguruan Tinggi	:	UINVERSITAS WAHID HASYIM		
	Nama Fakultas	:	HUKUM		
	Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM	
POLITIK HUKUM		2	-	I	
OTORITASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		KETUA PROGRAM		
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H.		 Dr. M. Siddiqon Prabowo, S.H., MH		



CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik hukum;
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum;
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan;
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang politik hukum.
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai politik hukum, yang mencakup: politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, politik penerapan/pelaksanaan hukum dan politik penegakan hukum, sehingga memahami hukum yang ideal (yang dicita-citakan) dan seharusnya dibentuk di masa mendatang serta hukum yang ditentukan, diterapkan dan ditegakkan di masa kini.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah Politik Hukum akan mengkaji tentang pengertian politik hukum, asal usul politik hukum, objek kajian dan ruang lingkup politik hukum, sifat politik hukum, faktor yang mempengaruhi politik hukum, tujuan politik hukum, hubungan hukum dan politik, karakter produk hukum dan konfigurasi politik, politik hukum di Indonesia dan perkembangan serta pembangunan hukum Indonesia. Mata kuliah Politik Hukum menjadi pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi Magister Hukum untuk mengantarkan mahasiswa memahami bahwa perkembangan dan pembangunan politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama dan hukum barat. Sebagai perguruan tinggi Islam, maka nilai-nilai Islam pun sangat berpengaruh terhadap pembangunan politik hukum Indonesia.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/ Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/ Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan asal-usul politik hukum	Pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan Asal-usul adanya politik hukum	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami objek kajian, ruang lingkup, sifat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum, tujuan politik hukum	1. Objek Kajian Politik Hukum 2. Ruang Lingkup Politik hukum 3. Sifat Politik Hukum 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum 5. Tujuan politik hukum	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang hukum, politik, hubungan kausalitas antara hukum dan politik, karakter produk hukum dan konfigurasi politik	1. Hukum dan Politik 2. Hubungan kausalitas antara hukum dan politik 3. Karakter produk hukum dan konfigurasi politik	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang politik hukum Indonesia, politik hukum menuju sistem hukum nasional, sistem hukum nasional Indonesia, fungsi untuk kegiatan sistem hukum	1. Politik Hukum Indonesia 2. Politik hukum menuju sistem hukum nasional Indonesia 3. Sistem hukum nasional Indonesia 4. Fungsi untuk kegiatan sistem hukum Sejarah Filsafat Hukum pada Zaman Sekarang (Zaman Baru)	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5

5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang perkembangan politik hukum perundang-undangan, pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan	1. Perkembangan politik hukum perundang-undangan 2. Pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
6	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan	1. Pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Materi muatan peraturan perundang-undangan	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
7	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang struktur hukum, budaya hukum	1. Struktur hukum 2. Budaya hukum	Kuliah interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
8	Exaluasi/Ujian Tengah Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	15
9	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang pembangunan politik hukum nasional, program pembangunan hukum nasional, constitusional reform	1. Pembangunan politik hukum nasional 2. hukum nasional, program pembangunan hukum nasional 3. constitusional reform	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
10	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang penegakan hukum dan HAM, masyarakatan dan kebudayaan hukum, peningkatan kapasitas profesional hukum	1. penegakan hukum dan HAM 2. masyarakatan dan kebudayaan hukum 3. peningkatan kapasitas profesional hukum	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5

11	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang sistem hukum Indonesia, terbentuknya sistem hukum nasional	1. sistem hukum Indonesia 2. terbentuknya sistem hukum nasional	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
12	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang pola pikir pembangunan hk nasional, negara hukum sebagai perwujudan sistem hukum	1. pola pikir pembangunan hk nasional 2. negara hukum sebagai perwujudan sistem hukum	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
13	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang grand design sistem dan politik hk nasional, politik hukum dalam legislasi nasional, pembenahan dalam program pembangunan.	1. grand design sistem dan politik hk nasional 2. politik hukum dalam legislasi nasional 3. pembenahan dalam program pembangunan	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
14	Evaluasi/Ujian Akhir Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	25

Daftar Referensi:

1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat, Dr. Mastur, SH., MH. 2023
2. Widayati, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
3. Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia
4. Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama
5. Ahmad Muliadi, Politik Hukum-----, (1975), Tugas Hukum, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Jakarta: Bhadrata.